

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pembangunan yang sedang dilaksanakan menuntut keterlibatan semua pihak, untuk senantiasa menggerakkan segala kemampuan dan potensi yang ada. Bangsa yang maju dan mandiri hanya dapat dibangun oleh manusia yang siap untuk maju, mau belajar dan bekerja keras.

Dalam proses pembangunan itu sendiri, upaya pengembangan masyarakat merupakan suatu keharusan dan kewajiban, karena pengembangan masyarakat merupakan suatu arah kedalam proses pertumbuhan dan perkembangan masyarakat kearah tujuan yang dicita-citakan yaitu pembangunan manusia seutuhnya. Sedangkan dikatakan kewajiban karena upaya pengembangan masyarakat merupakan suatu produk budaya masyarakat yang terus berkembang untuk mencari bentuk dan cara yang paling sesuai dengan perubahan dinamis yang terjadi pada masyarakat yang terus membangun. (Kartasasmita, 1996:145)

Pembangunan masyarakat merupakan upaya terencana dan sistematis yang dilakukan oleh, untuk, dalam masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup penduduk dalam semua aspek kehidupannya di dalam suatu kesatuan wilayah yang bertujuan untuk menciptakan kondisi – kondisi bagi kemajuan sosial

ekonomi masyarakat dengan partisipasi aktif dan kepercayaan sepenuh mungkin atas prakarsa masyarakat.

Pembangunan dalam pelaksanaannya selalu mengupayakan terjadinya pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan pada awalnya menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat, kelompok atau individu agar lebih berdaya. Selanjutnya menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. (Pranarka, 1996 dalam Tia, 2008 : 12)

Pemberdayaan tidak hanya diperuntukan kelompok atau masyarakat saja, melainkan termasuk keberdayaan individu seperti kemampuan berpikir kreatif, inovatif, mandiri dan mendayagunakan semua pengetahuan yang dimiliki sehingga mampu membangun dirinya sendiri dan lingkungannya yang berkontribusi pada proses pembangunan nasional.

Perempuan sebagai anggota dari masyarakat yang menjadi sasaran dari pemberdayaan mengupayakan adanya persamaan hak dengan laki-laki. Perempuan seperti halnya laki-laki yang sama-sama ingin memperoleh kesempatan yang sama dan adil untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Akan tetapi, nampaknya perempuan belum memperoleh peluang secara sama dalam mengakses pendidikan, ekonomi dan sosial politik. Oleh karena itu, salah satu upaya pemecahan kesenjangan terhadap kaum perempuan yaitu dengan program pemberdayaan perempuan.

Proses pemberdayaan pada perempuan adalah salah satu solusi yang paling populer untuk meningkatkan kemampuan perempuan. Dimana, pemberdayaan dapat dimulai dari pengalaman nyata rakyat dalam pengorganisasian dan bekerja, kemudian dilanjutkan dengan proses memstrukturkan pengalaman mereka dan selanjutnya mendorong mereka menemukan tindakan strategis baru bertumpu pada pemahaman baru dan lebih dalam dari apa yang telah mereka lakukan sebelumnya.

Roesmidi dan Riza, 2006:5 (Tia, 2008:30) mengemukakan bahwa “pemberdayaan perempuan meliputi pemberdayaan psikologi, sosial budaya, ekonomi, politik yang berkaitan erat satu sama lain, karena dengan adanya jaringan kerja sama diantaranya yang saling memberdayakan dapat tercipta transformasi sosial dimana tidak ada penekanan dan perbedaan terhadap kaum perempuan”.

Dalam Undang-undang Sisdiknas tahun 2003, pada Pasal 26; ayat 3 menyebutkan: “Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik”.

Program pemberdayaan perempuan kepala keluarga sebagai program pendidikan masyarakat merupakan sebuah upaya pemberdayaan yang lebih komprehensif, provokatif dan ideologis yaitu dengan menempatkan perempuan

kepala keluarga (janda) lebih pada kedudukan, peran, dan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga. Selain itu, upaya ini diharapkan mampu pula membuat perubahan sosial dengan mengangkat martabat janda dalam masyarakat yang selama ini terlanjur mempunyai stereotype negatif.

Data Susenas Indonesia tahun 2007 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang dikepalai perempuan mencapai 13.60% atau sekitar 6 juta rumah tangga yang mencakup lebih dari 30 juta penduduk. Jika dibandingkan data tahun 2001 ketika PEKKA pertama digagas yang kurang dari 13%, data ini menunjukkan kecenderungan peningkatan rumah tangga yang dikepalai perempuan rata-rata 0.1% per tahun.

Proses pemberdayaan perempuan kepala keluarga melingkup upaya – upaya untuk meningkatkan kemandirian dan keterampilan perempuan kepala keluarga yaitu kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri sendiri dalam berfikir dan bertindak serta tidak bergantung kepada orang lain secara emosional yang merupakan suatu sikap seseorang yang mandiri. Orang mandiri selalu mengandalkan dirinya sendiri untuk bersikap dan mengambil keputusan.

Kemandirian adalah konsep yang sering dihubungkan dengan pembangunan dan menjadi faktor yang sangat penting dalam pembangunan. Dalam konteks ini, konsep kemandirian mencakup pengertian kecukupan diri (*self-sufficiency*) di bidang ekonomi, juga meliputi faktor manusia secara pribadi yang di dalamnya mengandung unsur penemuan diri (*self-discovery*) berdasarkan kepercayaan diri (*self-confidence*). Sebagai implikasi dari saling berkaitnya unsur-

unsur dalam kemandirian, maka program-program yang di selenggarakan selalu mengupayakan pemberdayaan bagi golongan miskin agar dapat memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya sehingga memupuk kemandirian hingga menjadi pribadi yang kuat.

Upaya nyata program pemberdayaan perempuan kepala keluarga yang sedang berjalan saat ini yaitu peningkatan keterampilan atau melatih kecakapan hidup (life skill). Pendidikan kecakapan hidup merupakan kecakapan-kecakapan yang secara praktis dapat membekali warga belajar dalam mengatasi berbagai macam persoalan hidup dan kehidupan. Kecakapan itu menyangkut aspek pengetahuan, sikap yang didalamnya termasuk fisik dan mental, serta kecakapan kejuruan yang berkaitan dengan pengembangan akhlak peserta didik sehingga mampu menghadapi tuntutan dan tantangan hidup dalam kehidupan.

Kecakapan hidup adalah kemampuan dan keberanian untuk menghadapi problema, kemudian secara proaktif dan reaktif mencari dan menemukan solusi untuk mengatasinya. Pendidikan berorientasi kecakapan hidup bagi warga belajar adalah sebagai bekal dalam menghadapi dan memecahkan problema hidup dan kehidupan, baik sebagai pribadi yang mandiri, warga masyarakat, maupun warga Negara. Apabila hal ini dapat dicapai, maka ketergantungan terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan, yang bersifat pada meningkatnya angka pengangguran, dapat diturunkan, yang berarti produktivitas nasional akan meningkat secara bertahap.

Berkaitan dengan objek penelitian ini, Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga yang berada di Desa Pasirhuni Kecamatan Cimaung Banjaran

Kabupaten Bandung yang diselenggarakan oleh KOMNAS PEREMPUAN yang kemudian meminta Nani Zulminarni, pada saat itu adalah ketua Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), menjadi Koordinator program ini. Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga mempunyai visi untuk ikut berkontribusi membangun tatanan masyarakat yang sejahtera, adil gender dan bermartabat dengan mengorganisir dan memfasilitasi perempuan kepala keluarga agar mampu meningkatkan kesejahteraannya, memiliki kesadaran kritis akan haknya sebagai manusia dan warga negara, serta mempunyai kontrol terhadap diri dan proses pengambilan keputusan baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat.

Penyelenggaraan program perempuan kepala keluarga ini melingkupi kecamatan-kecamatan di kabupaten Bandung. Tetapi untuk memberikan gambaran dan sebagai percontohan, maka diawali di Desa Pasirhuni Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung. Jumlah perempuan kepala keluarga yang ada di Desa Pasirhuni sudah mencapai 200 orang. Namun yang mengikuti pelatihan life skills yang diselenggarakan disana adalah warga RW 02 sebanyak 1 orang, RW 04 sebanyak 13 orang, RW 06 sebanyak 19 orang dan RW 07 sebanyak 2 orang. Mayoritas pendidikan perempuan kepala keluarga tersebut adalah SD bahkan ada yang tidak tamat SD. Pekerjaan mereka adalah dagang dan buruh. Rata-rata pendapatan mereka per hari antara Rp.10.000 – Rp.40.000. Alasan para perempuan ini menjadi PEKKA adalah karena bercerai dengan suaminya, karena ditinggal mati oleh suaminya, karena suaminya sakit, dan perempuan di tinggal suaminya merantau tanpa kabar berita lebih dari satu tahun, dll.

Oleh karena itu dengan adanya program tersebut diharapkan dapat mengajarkan perempuan kepala keluarga berbagai keterampilan sebagai bekal untuk menjalani hidup baik sebagai pribadi yang mandiri, warga masyarakat, maupun sebagai warga negara. Dan pemberian wawasan kepada perempuan kepala keluarga yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap serta keterampilan lebih kita kenal sebagai Pelatihan Life Skills.

Berdasarkan situasi lapangan penelitian yang ada di Desa Pasirhuni Kecamatan Cimaung Banjaran Kabupaten Bandung, maka penulis bermaksud untuk meneliti mengenai “Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Dalam Meningkatkan Kemandirian Perempuan Kepala Keluarga Melalui Pelatihan Life Skills (Kecakapan Hidup)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi beberapa hal yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu :

1. Motivasi warga belajar untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan cukup tinggi dalam mengikuti setiap kegiatan pemberdayaan perempuan melalui pelatihan life skills dengan rata-rata tingkat kehadiran 80%.
2. Penyampaian materi dalam proses pembelajaran pelatihan life skills melibatkan partisipasi aktif dari warga belajar sehingga materi pelatihan ditentukan bersama antara tutor dan warga belajar.

3. Peran penyelenggara dalam hal ini pendamping lapangan memberikan motivasi dalam bentuk penguatan pada proses pemberdayaan perempuan kepala keluarga melalui pelatihan life skills.

C. Rumusan Masalah

Agar permasalahan berada pada ruang lingkup dan sesuai serta selalu terarah maka, penelitian ini dibatasi pada “Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Dalam Meningkatkan Kemandirian Perempuan Kepala Keluarga Melalui Pelatihan Life Skills”.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang ingin diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan perempuan kepala keluarga yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) yang berkoordinasi dengan tim pendamping lapangan Jawa Barat tepatnya di Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana bentuk kemandirian yang telah dicapai oleh perempuan kepala keluarga setelah pelaksanaan program pemberdayaan perempuan melalui pelatihan life skills di Desa Pasirhuni Kecamatan Cimaung Banjaran Kabupaten Bandung?
3. Apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat program pemberdayaan perempuan kepala keluarga di Desa Pasirhuni Kecamatan Cimaung Banjaran Kabupaten Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengungkapkan data tentang pelaksanaan program pemberdayaan perempuan kepala keluarga di Desa Pasirhuni Kecamatan Cimaung Banjaran Kabupaten Bandung.
2. Untuk mendeskripsikan adanya program pemberdayaan perempuan kepala keluarga dapat atau tidak dapat menumbuhkan kemandirian perempuan kepala keluarga di Desa Pasirhuni Kecamatan Cimaung Banjaran Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengungkapkan data tentang faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat program pemberdayaan perempuan kepala keluarga di Desa Pasirhuni Kecamatan Cimaung Banjaran Kabupaten Bandung.

E. Asumsi

1. Pemberdayaan merupakan suatu proses, dimana kekuatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan peranan masyarakat lebih diutamakan. Hal ini mungkin dicapai dengan menguatkan kapasitas mereka melalui pemberian kesempatan, keahlian dan pengetahuan sehingga mereka mampu untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang mereka miliki.
2. Pembangunan pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra kesejajaran laki-laki

dan perempuan, dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi/advokasi pendidikan dan latihan bagi kaum perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor.

3. Proses pemberdayaan perempuan kepala keluarga melingkup upaya – upaya untuk meningkatkan kemandirian dan keterampilan perempuan kepala keluarga dengan melaksanakan program yang berkelanjutan.
4. Pelaksanaan program pemberdayaan perempuan kepala keluarga selalu berupaya memberikan pendidikan, kecakapan-kecakapan yang secara praktis dapat menjadi bekal bagi perempuan kepala keluarga dalam mengatasi berbagai persoalan hidup yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap, serta kecakapan hidup sehingga mampu menghadapi tuntutan dan tantangan dalam kehidupan.

F. Definisi Konseptual

Pemberdayaan berasal dari kata "daya" artinya "kekuatan". "Berdaya" artinya memiliki kekuatan. Jadi "pemberdayaan" artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan adalah pemberian daya atau kekuatan kepada yang lemah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, serta untuk mengembangkannya. (Kartasmita, 1996)

Pemberdayaan dalam penelitian ini merupakan upaya untuk membuat orang lain berdaya dengan mengembangkan potensi dirinya dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia.

Pemberdayaan perempuan merupakan tindakan usaha perbaikan atau peningkatan ekonomi, social budaya, politik dan psikologi baik secara individual maupun kolektif yang berbeda menurut kelompok etnik dan kelas social. Dengan demikian pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan psikologi, sosial budaya, ekonomi, politik yang berkaitan erat satu sama lain, karena adanya jaringan kerja sama diantaranya yang saling memberdayakan dapat tercipta transformasi sosial dimana tidak ada penekanan dan perbedaan terhadap kaum perempuan.

Pemberdayaan perempuan dalam pandangan peneliti adalah upaya dalam memberikan kekuasaan pada perempuan dalam mitra kesejajaran dengan laki-laki dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Peran dan tugas perempuan dalam keluarga secara garis besar dibagi menjadi peran wanita sebagai ibu, ibu sebagai istri, dan anggota masyarakat. Secara kodrati, wanita sebagai manusia tidak dapat melepaskan diri dari keterikatannya dengan manusia lain. Seperti kita ketahui bahwa pada dasarnya berhubungan dengan individu lain merupakan suatu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Dari hubungan antar pribadi ini, tumbuhlah perasaan diterima, ditolak, dihargai-tidak dihargai dan diakui-tidak diakui. Di samping itu dari hubungan antar pribadi ini, manusia dapat lebih mengenal dirinya sendiri, banyak mendapatkan penilaian dan memberikan penilaian. Bergaul dengan individu lain, membuka kesempatan bagi wanita untuk dapat menyatakan diri dan mengembangkan kemampuannya.

Yang dimaksud perempuan kepala keluarga adalah perempuan-perempuan yang memang sudah menjadi kepala keluarga karena berstatus janda dan single parents akibat suaminya meninggal, ditinggal kerja suami yang menjadi TKI dan tidak diberi nafkah lahir batin oleh suaminya, serta perempuan yang masih single parents (belum menikah) tapi sudah harus membiayai kehidupan adik-adiknya karena kedua orangtuanya sudah tiada juga dianggap sebagai perempuan kepala keluarga.

Dalam pengertian sosial atau pergaulan antar manusia (kelompok, komunitas), kemandirian bermakna sebagai organisasi diri (*self-organization*) atau manajemen diri (*self-management*). Unsur-unsur tersebut saling berinteraksi dan melengkapi sehingga muncul suatu keseimbangan. Dalam konteks pembangunan, sikap mandiri harus dijadikan tolok ukur keberhasilan, yakni apakah rakyat atau masyarakat menjadi lebih mandiri atau malah semakin bergantung.

Sumantri (2000:2) mengartikan pelatihan sebagai: “proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir. Para peserta pelatihan akan mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang sifatnya praktis untuk tujuan tertentu”. Menurut Good, 1973 pelatihan adalah suatu proses membantu orang lain dalam memperoleh skill dan pengetahuan (M. Saleh Marzuki, 1992 : 5). Sedangkan Michael J. Jucius dalam Moekijat (1991 : 2) menjelaskan istilah latihan untuk menunjukkan setiap proses untuk mengembangkan bakat, keterampilan dan kemampuan pegawai guna menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

WHO (1997) mendefinisikan bahwa kecakapan hidup sebagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam kehidupan secara lebih efektif.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan diuraikan berdasarkan urutan sebagai berikut :

Bab I merupakan Pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Asumsi, dll.

Bab II adalah kajian pustaka yang menguraikan landasan – landasan teoritis yang berkenaan dengan fokus penelitian yang dilakukan yaitu mengenai Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Dalam Meningkatkan Kemandirian Perempuan Kepala Keluarga Melalui Pelatihan Life Skills. Diantaranya, Konsep Pemberdayaan, Konsep Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, Konsep Pelatihan, dan Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills).

Bab III membahas Metodologi Penelitian yang menjelaskan secara lebih lengkap dan rinci mengenai metode penelitian, teknik pengumpulan dan pengolahan data serta populasi dan sampel.

Bab IV adalah Hasil Penelitian yang menjelaskan tentang fakta-fakta dan kejadian yang ada pada penelitian yang dilakukan.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.